

PENDIDIKAN AGAMA BERBASIS MODERATISME (Melacak Kontribusi Nahdlatul Ulama)

Edi Susanto

Abstrak: Keragaman agama merupakan fenomena sosial niscaya yang perlu disikapi dengan arif, sehingga benar-benar menjadi rahmat nyata kehidupan. Untuk dapat bersikap arif, sangat dibutuhkan pola pendidikan agama berbasis inklusivistik. Tulisan ini berusaha melacak kontribusi NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang berusaha mengedepankan sikap *i'tidâl*, *tawâzun* dan *tasâmuh*, dalam mewujudkan pola keberagaman yang bersikap positif terhadap perbedaan dan keragaman yang merupakan karakteristik dan *ending process* dari pendidikan agama [Islam] berbasis moderatisme.

Kata kunci: NU, pendidikan agama berbasis moderatisme, pluralitas, toleransi beragama.

Pendahuluan

Beberapa dekade belakangan ini, fenomena kekerasan dalam beragama mengaktual ke permukaan dengan eskalasi yang sedemikian meluas. Fenomena paling mutakhir adalah terjadinya serangkaian konflik dan kekerasan yang terjadi di Poso¹. Para intelektual, kemudian memunculkan analisis bahwa misi agama pada aras historis, tidak selalu artikulatif, sebab dalam perjalanannya, selain sebagai alat pemersatu sosial, agama juga dapat menjadi unsur konflik.² Lebih

¹ Peristiwa bernuansa SARA di Poso, misalnya eksekusi mati atas Fabianus Tibo Cs, telah membuat umat Nasrani bereaksi keras di sana. Sebagai serentetan reaksi tersebut, pada hari senin 16 Oktober 2006 terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal terhadap Sekretaris Gereja Sinode Sulawesi Tengah, Pendeta Irianto Kongkoli sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal. Penjelasan dan serentetan peristiwa kekerasan lain periksa Jawa Pos edisi 17 Oktober 2006

² Periksa Abd. Rohim Ghazali, "Inklusivitas Kebenaran Agama", *Kompas* 23 Agustus 1996.

jauh, bahkan ada yang menyatakan agama mempunyai fungsi ganda yakni sebagai kekuatan pengikat ke dalam yang luar biasa dan semangat yang keras menyalakan pertentangan ke luar (*power of internal integrity and power of external conflict*).³

Namun demikian, tidak jarang juga yang meragukan tesis tersebut dengan mengajukan argumentasi berikut: “Kita mungkin perlu berangkat dari *common belief* bahwa Tuhan itu Maha Baik, maka Ia menciptakan agama juga untuk kebaikan. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk-Nya yang terbaik. Karena itu jangan menyalahkan agama, apalagi Tuhan dengan terjadinya berbagai kasus kekerasan dengan kedok agama. Lihatlah ke dalam diri kita, mungkin ada yang salah dalam kita beragama. Dan kesalahan ini jangan-jangan merupakan produk sejarah dan pendidikan. Sehingga pertanyaannya adalah apakah kita akan menjadi tawanan sejarah ? atau kita yakini bahwa kalau Tuhan itu baik maka semua karya-Nya pasti baik. Agama dan manusia adalah karya Tuhan yang baik, karena itu seharusnya baik. Kalau tidak baik, pasti ada sesuatu yang disalahpahami atau disalahkomunikasikan.”⁴

Sehubungan dengan fenomena kekerasan dalam beragama, paling tidak model kepelemukan agama yang *eksklusivistik* memiliki akses paling besar, mengingat karakteristik keberagamaan model ini beranggapan bahwa ajaran agama yang diyakini paling benar adalah agamanya sendiri atau madzhab pemikirannya sendiri, sedang pemeluk agama ataupun madzhab lain perlu dikikis atau dikonversi mengingat mereka tersesat.⁵

³ Periksa Burhanuddin Daya, “Hubungan Antar Agama di Indonesia”, dalam *Ulumul Qur’ân* Nomor 4 Vol. IV, Th. 1993.

⁴ Komaruddin Hidayat, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi: Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah*. (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm., 228.

⁵ Komaruddin Hidayat, “Ragam Beragama”, dalam *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik*. Ed. Andito. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 119. Lebih lanjut Komaruddin mendaftar lima model beragama yakni *eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme* dan *universalisme*. Penjelasan lebih rinci dan implikasi model-model tersebut dalam kehidupan periksa Edi Susanto, “Pluralitas Agama (Meretas Toleransi Berbasis Multikulturalisme Pendidikan Agama)”, *Tadrîs Jurnal Pendidikan Islam* Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan (Vol. 1, No. 1, 2006), hlm., 45.

Atas dasar itu, pola pemahaman *eksklusivistik* terhadap agama inilah yang perlu dibenahi di tengah realitas kehidupan yang sedemikian kompleks pluralistik. Dalam konteks inilah, tulisan ini akan meneropong kiprah organisasi sosial keagamaan Nahdhatul Ulama (selanjutnya ditulis NU) atas kontribusinya di dalam mewujudkan pola keberagamaan yang bersikap *positive thinking* terhadap pluralitas multikultural, mengingat organisasi ini sejak awal telah menisbahkan dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan yang mengedepankan watak *tawâzun, tasâmuh* dan *i'tidâl*, suatu jargon yang kental dengan nuansa moderatisme.

NU dan Wacana Pembaruan Pemikiran Islam

Sebagai organisasi sosial keagamaan dengan basis tokoh yang kuat dan berjumlah besar dalam penguasaan bahasa Arab sekaligus penguasaan mendalam terhadap disiplin ilmu keislaman tradisional,⁶ kiprah NU dalam wacana keagamaan tidak perlu diragukan lagi⁷. Namun demikian, kiprah pembaruan pemikiran Islam yang digagas dan dipelopori oleh NU –atau lebih tepatnya tokoh dan pemikir liberal

⁶ Kata tradisional dalam pengertian ini bukan dimaksudkan sebagai istilah sebagaimana dinyatakan oleh Clifford Geertz atau pun oleh Deliar Noer, yang berkonotasi “negatif”. Tradisional disini dimaksud adalah penguasaan disiplin ilmu yang sudah sedemikian lazim dalam epistemologi keilmuan Islam klasik seperti ‘Ulûm al-Hadîts, ‘Ulûm al-Tafsîr, ‘Ilm al-Tawhîd dan ilmu-ilmu lainnya yang sudah sedemikian akrab dalam khazanah keilmuan muslim klasik.

⁷ Dalam konteks ini, Martin van Bruinessen menegaskan bahwa meskipun pembaruan pemikiran Islam boleh dikatakan, bertentangan dengan semangat keagamaan NU, namun tidak dapat dipungkiri –berkat pemikiran *brillyan* para tokoh dan eksponen didalamnya—NU sebagai organisasi keagamaan konservatif telah melahirkan gerakan yang progresif, bahkan menjadi motor dinamika pemikiran Islam. Periksa Martin van Bruinessen “NU Jamaah Konservatif yang Melahirkan Gerakan Progresif”, dalam Laode Ida, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*. (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm., xii. Sebutan jamaah konservatif terhadap NU sesungguhnya sedemikian beralasan mengingat NU didirikan sebagai wadah aspirasi dan artikulasi keagamaan dari kalangan santri tradisional sekaligus dimotivasi oleh perlakuan yang “kurang simpatik” dari santri peritanis. Tentang kekurangsimpatikan perlakuan kalangan santri puritanis terhadap santri tradisional, secara panjang lebar dan faktual periksa Andree Feillard, *NU vis a vis Negara*. Terj. Lesmana (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm., 6-11. Lebih elaboratif lagi periksa M. Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik*. (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm., 45-62.

kalangan NU⁸ --tidak bersifat borjuistik⁹, sebagaimana diidentifikasi pada model pembaruan pemikiran Islam yang digagas oleh Nurcholish Madjid¹⁰. Pemikiran pembaruan para tokoh NU tersebut lebih bernuansa praktis dan diartikulasikan dalam wacana pemikiran yang tidak terlalu *mendakik-dakik* –sebagaimana tampak dalam gagasan Cak Nur—tetapi dikemas dalam kemasan sederhana dan mudah dipahami.

⁸ Misalnya Abdurrahman Wahid, M. Sahal Mahfudz, Masdar Farid Mas'udi, Said Aqiel Siraj untuk menyebut beberapa nama. Abdurrahman Wahid, terkenal dengan gagasan pribumisasi Islamnya, M. Sahal Mahfudz terkenal dengan Fiqh Sosialnya -- sehingga beliau dianugerahi Doktor Honoris Causa oleh lembaga pencetak pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta--, Masdar F. Mas'udi semakin kentara lagi dengan gagasan Risalah Pajak dan Zakatnya, serta ijtihadnya tentang waktu Haji yang sedemikian menggemparkan dunia Islam dan Said Aqiel Siraj, yang terkenal dengan reaktualisasi konsep Aswajanya dan praktik-praktik pluralismenya yang sedemikian vulgar dan kontroversial.

⁹ Istilah Muslim Borjuis adalah kalangan Muslim perkotaan, dengan status pekerjaan, ekonomi dan pendidikan yang relatif lebih mapan dibandingkan dengan kalangan Muslim tradisional (muslim kebanyakan konstituen NU). Periksa Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*. (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm., 44.

¹⁰ Setelah melalui telaah mendalam dengan menggunakan pisau analisis wacana Michael Pecheux --yang berteori bahwa artikulasi wacana dan tipologinya banyak dipengaruhi oleh posisi kelas seseorang karena ia menyangkut serangkaian pembelaan mana yang perlu diteguhkan—dan konsep ideologinya L. Althusser serta konsep arkeologi pemikiran dari Michael Foucault, Nur Khalik Ridwan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa konsep pembaruan pemikiran model Cak Nur, sangat sarat dengan pembelaan dan sangat menguntungkan kelompok Islam borjuis. Lebih jauh Ridwan menegaskan: Tidak mengherankan kalau akhirnya pluralisme Cak Nur sebenarnya untuk membela kepentingan politik, ekonomi dan sosial Islam borjuis, karena dari sejarah kemunculannya memang untuk memberikan ruang bagi akses politik dan ekonomi Islam borjuis. Sejumlah kasus tendensiusnya Cak Nur dan keberpihakan yang berat sebelah untuk membela Islam borjuis, menunjukkan itu. Dalam kasus pelengseran Gus Dur, Cak Nur tumpul dalam mengkritik Amien Rais dan Akbar Tandjung yang memang merupakan teman di lingkaran Islam borjuis; dalam kasus Front Pembela Kebenaran, Cak Nur mengkritik keras, tetapi membiarkan Laskar Jihad --yang memang merupakan bagian dari komunitasnya. Kebisuan Cak Nur sangat menguntungkan kelompok Islam borjuis yang mengusung masalah itu, sebab bila Cak Nur bersuara yang menunjukkan ia mempraksiskan gagasan pluralismenya, akan mengancam agregasi kepentingan-kepentingan Islam borjuis. Periksa Ibid., hlm., 373-374.

Lebih lanjut, bila sebelum “Khittah”¹¹ fatwa-fatwa yang dikeluarkan NU banyak berkisar pada masalah *furû’*, dan dimensi ritual, maka setelah itu makin luas. Bahkan ada tuntutan dari kyai-kyai muda agar NU berbicara mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan, bahkan yang kontroversial sekalipun.¹² Pada sisi lain, dalam sidang *Bahts al-Masâil* yang sebelumnya hanya berasal dari lingkungan kecil kyai-kyai yang dianggap bisa memberikan fatwa, kini sudah mulai berubah¹³.

Namun demikian, di tengah dinamika intelektual NU yang sedemikian menampakkan *greget*, ikhtiar mewujudkan Khittah NU di bidang pemikiran keagamaan sama sekali belum selesai, dan karenanya agenda penting juga terletak dalam bidang ini, mengingat gerakan pemikiran keagamaan ini menjadi ciri khas NU karena NU memiliki dan menguasai literatur teks keagamaan yang sangat kaya, sehingga – dengan modal kekayaan intelektual tersebut—diharapkan lebih leluasa

¹¹ Ada beberapa sebab NU menerapkan *Khittah. pertama*, realitas mayoritas warga NU adalah masyarakat pedesaan yang merupakan lumbung orang miskin. Mereka banyak yang menjadi petani, tetapi tidak memiliki tanah (sehingga lebih tepat disebut buruh tani). Dengan kembali ke *khittah*, diobsesikan agar NU kembali berkhidmat mengurus garapan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga kehadirannya bisa dirasakan oleh warganya yang marginal di segala bidang: sosial, ekonomi dan pengetahuan. *Kedua*, NU kembali ke *khittah* juga disebabkan oleh keinginan menguatkan keberdayaan masyarakat guna mengimbangi kuatnya negara. Kekuatan negara –dalam hal ini negara Orde Baru Soeharto—sedemikian kuat dan sudah keterlaluhan, yang jika tidak diimbangi dengan kekuatan masyarakat, akan menimbulkan banyak ketimpangan yang penuh dengan penindasan, ketidakadilan dan tidak adanya kemandirian di masyarakat. Dalam konteks ini NU diobsesikan untuk memperkuat posisi dan daya tawar warga negara --yang telah banyak dieksploitasi dan dihegemoni oleh negara--melalui peningkatan pengetahuannya, berdaya ekonomi dan sosial. *Ketiga*, sebagai mekanisme kontrol karena banyaknya tokoh NU yang terlibat dalam politik praktis sehingga dikhawatirkan jika hampir keseluruhan eksponen NU terlibat dalam politik praktis, eksistensinya sebagai organisasi sosial keagamaan yang *concern* pada keprihatinan masyarakat kecil marginal menjadi terabaikan. Periksa Ahmad Nurhasim dan Nur Khalik Ridwan, *Demoralisasi Khittah NU dan Pembaruan*. (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), hlm., 26-33.

¹² Periksa Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. (Yogyakarta: LKiS, 1994).

¹³ Hal itu berarti dinamika gerakan pembaruan di internal NU, tidak lagi statis, namun dinamis, baik dari segi cakupan wilayah materi pembaruannya maupun pada mekanisme dan unsur yang terlibat didalamnya.

Pendidikan Agama Berbasis Moderatisme

dalam mendinamisasikan pemikiran keagamaan sesuai dengan konteks dan isu-isu pada setiap masa.

Dalam konteks ini, asas moderasi senantiasa menjadi pegangan eksponen dan tokoh intelektual NU dalam merespon gelombang pemikiran-pemikiran baru. Pada sisi lain, para tokoh terkemuka NU dan para generasi mudanya berusaha untuk terus mengembangkan dan sekaligus bersikap responsif terhadap pemikiran-pemikiran baru.

Lebih lanjut, gagasan pembaruan keagamaan eksponen NU, terutama tentang fiqh politik dan reorientasi *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah (aswaja)* dapat disimak pada bagan berikut ini: ¹⁴

Aspek	Fiqh Politik Lama	Gagasan Kontekstual Fiqh Politik
Acuan yang biasa digunakan “taatlah kepada Allah, Rasul dan pemerintah...”	Substansinya adalah untuk menjadikan rakyat patuh pada pemerintah sebagai suatu kewajiban individu/masyarakat	“Taatlah kamu kepada Allah, Rasul dan pemerintah..” dan “jika memerintah, kamu harus adil”. Ditujukan kepada rakyat agar patuh pada pemerintah yang berbuat adil bagi kepentingan rakyat, sebaliknya kalau pemerintah tak berbuat adil maka berarti rakyat boleh bahkan wajib untuk tidak mematuhi.
Keabsahan kekuasaan pemerintah	Ditentukan oleh dirinya sendiri dan rakyat dianggap sebagai pihak lain ikut saja atau harus tunduk saja	Semua aturan atau tata laksana kekuasaan hanya sah secara moral bila mengacu pada kepentingan rakyat
Posisi hak-hak rakyat	Tak tampak	Hak-hak rakyat dimunculkan, diekspresikan dan dijadikan dasar untuk mewajibkan

¹⁴ Periksa Laode Ida, *NU Muda, Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*. (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm., 153.

		pemerintah untuk melindungi dan menjaminnya.
Posisi politik umat Islam /NU	A-politik karena dianggap bahwa (1) politik merupakan monopoli pemerintah dengan pendekatan tangan besinya bagi rakyat yang bertentangan dengannya, sehingga kemudian (2) negara menjadi malapetaka bagi rakyat	Memiliki kesadaran dan atau harus sadar akan hak-hak politiknya. Kekuasaan merupakan milik rakyat dan penyelenggara negara sebagai pelayan rakyat/masyarakat Negara merupakan alat untuk menegakkan keadilan.
Subyek fiqh	Skala individu	Skala kolektif, dimana tingkah laku negara selalu dikontrol oleh masyarakat. Undang-Undang merupakan perwujudannya.

Pemikiran-pemikiran tentang gagasan kontekstual fiqh politik ini, juga dikembangkan Masdar F. Ma'udi dalam hubungan antara masyarakat dan negara yang berkaitan dengan masalah zakat.¹⁵

¹⁵ Menurutnya kalangan umat Islam selama ini menganggap pajak hanya sebagai kewajiban individual dalam rangka membersihkan harta (dan atau diri manusia) serta anjuran moral untuk membantu kelompok masyarakat atau orang-orang lemah. Pada hal zakat sebenarnya merupakan sistem perpajakan menurut Islam yang harus masuk dalam sistem negara, dan atau negara harus bertanggung jawab. Dengan membayar zakat, posisi tawar rakyat semakin kuat dan menjadi dasar kuat bagi eksistensi negara. Dalam konteks ini dengan membayar zakat, bukan berarti sama dengan membayar upeti rakyat terhadap raja dimana kemudian rakyat tidak berhak mengontrolnya (karena hanya merupakan kewajiban rakyat). Sebaliknya membayar pajak merupakan

Pendidikan Agama Berbasis Moderatisme

Sedangkan reorientasi (pembaruan) paham keagamaan *aswaja*, sebagaimana ditawarkan salah seorang *think tank* PB NU yakni Said Aqiel Siraj adalah sebagai berikut: ¹⁶

Aspek	Aswaja yang dipahami	Gagasan “Baru” Aswaja
Posisi Aswaja	Dianggap sebagai madzhab, lambang (monopoli kebenaran) Sunni. Yang diandalkan adalah <i>ijmâ’</i> (kesepakatan) ulama, mengikuti dan memegang teguh pada apa (teks) yang telah dikatakan Rasulullah dan sahabat-Nya, seolah-olah tidak pernah ada perselisihan diantara para sahabat.	Aswaja bukan sebagai madzhab, tetapi sebagai metode berpikir (<i>manhâj al-fikr</i>) yang mencakup segala aspek kehidupan dan berdiri di atas prinsip keseimbangan didalam aqidah, penengah dan perekat dalam kehidupan sosial serta keadilan dan toleransi dalam politik. Ia bisa mengayomi semua madzhab berdasarkan kriteria dasar al-Qur’ân dan Hadits.
Nilai kebenaran	Ekklusif, ketat dan cenderung pada kebenaran absolut serta tekstual. Ia mewarisi dan memegang teguh pada kebenaran yang ada dan menghindari penjelasan ilmiah	Inklusif, lunak dan cenderung pada kebenaran relatif serta kontekstual berdasarkan ruh al-Qur’ân dan hadits. Ia mencari kebenaran dengan analisis ilmu pengetahuan (analisis historis rasional) setelah penalaran dan mendapat

wujud dari transformasi kekuasaan pemerintah kepada rakyat. Periksa Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991)

¹⁶ Ida, *NU Muda*, hlm., 155-156. Secara lebih original periksa Said Aqiel Siraj, “Latar Kultural dan Politik Kelahiran Aswaja”, dalam Imam Baehaqi. Ed., *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*. (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm., 3-32.

		kebenaran baru dalam beriman sehingga hati dan jiwa menjadi tenang
Wawasan dasar	Sunni adalah Islam/Muslim, sehingga kalau tidak sunni dianggap tidak Islam/Muslim. Ia secara ketat menganut paham Asy'ari dan Maturidi dalam aqidah, madzhab empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali) dalam fiqh, serta Junaid dan al-Ghazali dalam tasawuf	Sunni tidak sama dengan Islam (mengikuti alur pikir Ibn Sina), memiliki wawasan dan cakrawala berpikir yang luas dan bersikap toleran.
Orientasi	Tradisional-konservatif, lebih pasif dan kontemplatif, cenderung pasrah pada keadaan yang dianggap sebagai takdir (misalnya, kemiskinan suatu kelompok masyarakat disebabkan takdir Tuhan)	Rasional progresif, lebih aktif dan asketis (sehingga kemiskinan suatu kelompok masyarakat, misalnya, lebih karena faktor manusia sendiri).
Hubungan sosial	Orientasi hirarkies para ulama /kyai sangat menentukan, nilai-nilai kharismatik sangat menonjol dan cenderung feodalis	Menekankan pada substansi dan orisinalitas gagasan, tidak terlalu menekankan pada kualitas/status aktor
Penilaian	Bersifat <i>preskriptus etis</i> yaitu cenderung memberikan penilaian berdasarkan kebenaran paham yang dianutnya (<i>value judgement</i>)	Bersifat deskriptif eksplanatif, yakni lebih cenderung memberikan penjelasan (<i>value neutrality</i>) berdasarkan al-Qur'ân dan hadits.

Noktah-noktah gagasan di atas, merupakan sesuatu yang tidak lazim di NU dan karenanya banyak ditentang oleh kalangan kyai NU konservatif, tetapi sangat diminati, diakomodasi sekaligus direkomendasikan --untuk dikembangkan-- oleh Abdurrahman Wahid sebagai pucuk pimpinan NU – yang menjabat mulai tahun 1984 sampai 1999, bahkan Gus Dur sendiri tidak kurang kontroversialnya dalam melancarkan gagasan pembaruan pemikiran Islam.¹⁷

Atas dasar itu, dapat ditegaskan bahwa NU --dengan dipelopori oleh eksponen-eksponennya yang berwawasan progresif liberal—telah berkiprah dalam mewacanakan proyek pembaruan pemikiran Islam, bahkan nuansanya lebih *menukik* dan lebih *menggigit* dibandingkan dengan gerakan pembaruan pemikiran Islam yang dikembangkan oleh kalangan Muslim modernis¹⁸ –atau Muslim Borjuis, dalam istilah Nur Khalik Ridwan, sehingga benar sinyalemen dari Martin van Bruinessen, bahwa NU merupakan organisasi konservatif yang telah melahirkan anak kandung yang liberal dan progresif, sehingga kiprahnya dalam proyek pembaruan pemikiran Islam sangat signifikan dan tidak diragukan lagi.¹⁹

¹⁷ Abdurrahman Wahid –bernama asli Abdurrahman ad-Dakhil—memang sering melakukan tindakan dan pemikiran yang kontroversial, sehingga sering diidentifikasi sebagai “sebuah cermin dengan banyak gambar”. Gagasannya tentang pribumisasi Islam, kedekatannya dengan penganut agama lain dan pembelaannya yang sedemikian tegar dalam membela kaum minoritas membuat ketokohnya amat sangat diperhitungkan dan bersifat lintas kalangan. Lebih lanjut periksa Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia; Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rakhmat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm., 96. Lihat juga Imran Hamzah dan Choirul Anam. ed., *Gus Dur Diadili Kiai-Kiai*. (Surabaya: Jawa Pos, 1989), hlm., 14.

¹⁸ Tokoh pemikir liberal dalam eksponen Islam modernis antara lain adalah Amin Abdullah (Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), yang pemikiran-pemikirannya kurang begitu diterima oleh komunitasnya sendiri; Moeslim Abdurrahman dan M. Dawam Rahardjo. Khusus Dawam Rahardjo, sudah dikeluarkan dari Muhammadiyah karena pemikirannya yang terlampau dianggap liberal. Diangkatan yang lebih muda, tampak pemikir seperti Zuly Qodir, pendiri JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah), Sukidi dan Ahmad Najib Burhani.

¹⁹ Secara kelembagaan juga dibuktikan dengan sedemikian *concern*-nya NU dalam mengembangkan wacana keagamaan kritis, seperti nampak dalam program P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dan Lakpesdam (Lembaga

Bahkan, *greget* pembaruan pemikiran yang diintrodusir oleh generasi progresif NU tidak hanya menyangkut kritik terhadap teks-teks keagamaan, tetapi juga mengembangkan dimensi bagaimana hubungan keagamaan NU dengan agama-agama lain, problem ekonomi, sosial sekaligus memelopori pemikiran-pemikiran baru yang lebih responsif terhadap persoalan kehidupan masyarakat kontemporer.²⁰

Meski demikian, satu hal yang masih sangat kentara yakni elitisme²¹ pemikiran-pemikiran baru tersebut di atas, sehingga agenda mendesak ke depan adalah dipikirkan bagaimana strategi yang jitu agar diseminasi pemikiran baru NU tersebut agar sampai ke tingkat bawah, terutama pusat-pusat kantong NU, yakni pesantren-pesantren.

Dengan menyimak fenomena sebagaimana dideskripsikan di atas, sampai batas tertentu, NU melalui para tokohnya, telah menyemai liberalisme pemikiran keagamaan. Fenomena ini, jika dibidik dari perspektif pendidikan, akan berimplikasi secara signifikan terhadap pola pendidikan agama yang dikembangkan oleh eksponen NU, yakni pola pendidikan agama yang bermuara pada moderatisme. Fakta terhadap fenomena ini dapat ditelusuri pada kajian berikut ini.

NU dan Wacana Pluralitas Agama: Format Nyata Pendidikan Agama Berbasis Moderatisme

Seiring dengan reinterpretasi fiqh politik NU dan reinterpretasi aktualisasi konsep *aswaja* yang sedemikian terbuka, sekaligus pembaruan dalam aras dan dimensi lainnya, maka implikasinya

Pengembangan Sumber Daya Manusia), yang telah melahirkan banyak pemikir muda NU yang sedemikian liberal dan artikulatif dalam mensosialisasikan gagasan pembaruan pemikirannya. Sebut saja misalnya Ahmad Baso yang telah menjadi *ikon Post Tradisionalisme Islam*, Zuhairi Misrawi, Ahmad Suaedy, Khamami Zada dan -- yang sangat fenomenal adalah Ulil Abshor Abdalla, sebagai *lokomotif gerbong JIL* (Jaringan Islam Liberal)

²⁰ Misalnya bagaimana NU menyikapi perbedaan-perbedaan dalam konteks pemikiran keagamaan, bagaimana posisi NU ketika ada kelompok-kelompok yang melakukan pengkafiran, pemurtadan dan memberikan fatwa mati terhadap pemikiran-pemikiran yang berbeda, interaksi dengan komunitas beragama berbeda, sikap terhadap pluralitas dan sebagainya, yang pada gilirannya meningkatkan citra eksponen NU dengan gerakan pembaruan pemikiran keagamaan.

²¹ Nurhasim, *Demoralisasi Khittah NU*, hlm., 153.

Pendidikan Agama Berbasis Moderatisme

terhadap wacana kemajemukan (pluralitas) agama sedemikian signifikan.

Signifikansi tersebut, sampai batas tertentu, berakar pada beberapa karakter dasar NU dalam menjalin interaksi sosial kemasyarakatan yakni menonjolkan sikap *tawâsuth* dan *i'tidâl*, sikap *tasâmuh* dan sikap *tawâzun*²². Karakter dasar tersebut menjadi basis sikap keagamaan para aktivis dan anggota NU yang secara umum menampakkan citra perilaku inklusif.²³ Tabel berikut ini memperjelas basis inklusivitas tersebut²⁴:

Dimensi	Eksklusif	Inklusif
Normatif/ landasan organisasioris	Mencantumkan Islam sebagai dasar dan simbol dalam organisasi	Tidak menjadikan Islam sebagai satu-satunya asas organisasi
Cara pandang kyai terhadap keragaman	Komunitas di luar NU sebagai lawan atau selalu diwaspadai	Keragaman merupakan realitas sosial budaya yang diterima sebagai potensi yang bisa

²² Sikap *tawâsuth* dan *i'tidâl* merupakan sikap moderat, sikap tengah. Berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama dan selalu menghindari dari sikap ekstrem (*tatharruf*). Sikap *tasâmuh* berarti sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau masalah *khilafiyah* serta dalam kemasyarakatan dan kebudayaan. Sedangkan sikap *tawâzun* merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat, menyerasikan khidmat kepada Allah, khidmat kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidup serta berusaha menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

²³ NU dapat diidentifikasi sebagai organisasi sosial keagamaan inklusif pada dua aras. *Pertama*, secara normatif tidak mencantumkan Islam sebagai asas organisasi, yang ada hanya "nama, tujuan dan usaha", *kedua*, dalam interaksinya dengan komunitas lain dari basis agama atau kepercayaan yang berbeda. Aspek kedua ini sangat kentara terlihat pada sikap pimpinan puncaknya yakni Gus Dur dan Said Aqiel Siraj serta beberapa generasi yang lebih muda, seperti Ulil Abshar Abdalla dan generasi seangkatannya.

²⁴ Ida, *NU Muda*, hlm., 95.

		dikembangkan dalam masyarakat
Cara pandang dalam memahami Islam	Menganggap diri sebagai satu-satunya sumber kebenaran	Ada toleransi terhadap kebenaran dari agama dan budaya lain
Watak dasar dalam hubungan sosial	Kaku (sulit membangun hubungan yang luwes dan terbuka karena selalu mewaspadaai pihak lain)	Fleksibel (berinteraksi dengan komunitas yang berbeda)
Cara pandang terhadap masalah sosial	Sebagai masalah sektoral dari agama atau komunitas tertentu	Sebagai masalah bersama yang dilihat dari sudut kemanusiaan.

Dengan karakter dasar yang tidak mencantumkan agama sebagai dasar organisasi, berpandangan positif afirmatif terhadap keragaman sehingga bersikap toleran terhadap kebenaran agama dan budaya lain yang akhirnya akan membentuk perilaku yang fleksibel dan dalam memandang masalah sosial senantiasa mementingkan komunalitas atas dasar prinsip persaudaraan kemanusiaan (*ukhûwah insâniyyah*), maka suatu hal yang wajar sekaligus merupakan sesuatu yang original jika para eksponen NU mengalami transformasi dari perilaku jumud ke arah *enlightenment* dan *empowerment* sebagaimana diidentifikasi secara jeli oleh Laode Ida:²⁵

Dimensi	Jumud	Tercerahkan dan Berdaya
Metode pengajaran	Monoton dari kyai	Adaptasi dengan metode alternatif
Sumber kebenaran	Dari kyai (kitab-kitab pegangan semata)	Adanya pengakuan tentang sumber kebenaran realitas lain

²⁵ Ibid., hlm., 100.

Pendidikan Agama Berbasis Moderatisme

Manajemen	Adanya kendali politisi	Transformasi manajerial ke aktor-aktor non politisi
Kondisi massa	Liar (tak terorganisir)	Terbangunnya koordinasi sebagai kekuatan <i>civil society</i>
Hubungan kyai santri	Monolog, watak kyai yang otoriter	Munculnya kesadaran akan pentingnya suasana dialogis. Dialog relatif egaliter
Cara pandang terhadap kyai	Kyai sebagai sumber ajaran tentang kebenaran	Santri menemukan kebenaran dari sumber lain
Hubungan/sikap santri terhadap kyai	Fanatis dan cenderung kultus individu	Adanya kesadaran menggugat kultus individu dan <i>status quo</i>
Posisi politik warga	Terkooptasi oleh politisi pengendali NU	Adanya penolakan kooptasi, mandiri dalam menentukan sikap dan pilihan politik.

Demikianlah, telah terjadi perubahan bandul perilaku pada eksponen dan warga NU --meskipun masih dalam lingkup yang sedemikian terbatas, yakni terbatas pada kalangan anak muda NU yang kaya idealisme dan terdidik secara akademik— dari wawasan jumud ke arah perilaku progresif bahkan liberal sehingga bukan merupakan sesuatu yang juga mengejutkan jika para eksponen dan tokoh-tokoh NU berwawasan dan berperilaku plural dan demokratis egaliter dalam hidup kesehariannya, apakah itu antara internal komunitasnya sendiri, lintas budaya maupun lintas agama.

Sebagai ikhtiar sosialisasi pembaruan pemikiran keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pluralitas –terutama pluralitas keagamaan—Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), sebagai sebuah LSM NU yang sangat *concern* dengan wacana inklusivisme, mengadakan pembinaan terhadap kyai-kyai melalui serangkaian *khalqah-khalqah* yang didanai oleh lembaga-lembaga internasional seperti *The Asia Foundation (TAF)*, *PACT Indonesia*,

OTI-USAID, Ford Foundation dengan tujuan berupaya melakukan penyadaran kepada para kyai di lingkungan NU, mulai dari diskusi-diskusi, seminar dan pelatihan sampai kepada penerbitan buletin, buku-buku dan jurnal ilmiah yang semuanya menunjukkan upaya membangun kesadaran kritis para kyai pada khususnya dan kalangan *nahdhiyyin* pada umumnya. Dari sekian banyak *khalqah* yang diadakan selama tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, dua kali terdapat *khalqah* tentang Islam dan Pluralisme. *Pertama*, *khalqah* yang diadakan di Magelang tahun 1999. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para kyai, santri dan aktivis LSM (berbasis pesantren) terhadap konsep dan hakikat masyarakat negara yang pluralistik, sehingga demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sangat penting untuk dipahami dan diaktualisasikan dengan benar dalam negara kebangsaan yang pluralistik. *Kedua*, *khalqah* yang diadakan di Bangil juga pada tahun 1999 tentang konsep ukhuwah dan pluralisme, kegiatan ini dilakukan untuk lebih memberikan pemahaman dan konsep-konsep strategis tentang hubungan-hubungan antar kelompok masyarakat dalam suatu masyarakat yang pluralistik.²⁶

Pemikiran-pemikiran “pembaruan kritis” sebagaimana antara lain disajikan di atas, pada satu pihak memang dianggap sebagai ekspresi dari sikap dan pemikiran yang *nyeleneh* –bahkan berkategori murtad— sehingga ditentang keras oleh sebagian kyai dalam NU sendiri²⁷. Namun dipihak lain, sebagian tokoh NU sendiri memahami pemikiran-

²⁶ Ida, *NU Muda*, hlm., 129-130.

²⁷ Apalagi setelah sang penggagasnya –semisal Gus Dur dengan pribumisasi Islamnya dan keakraban serta pembelaannya yang sedemikian kuat terhadap minoritas kristen dan konghucu, Said Aqiel dengan reinterpretasi Aswaja dan sikapnya yang kerap berkhotbah di gereja-gereja, Masdar F. Mas’udi dengan gagasannya tentang waktu haji yang tidak mesti di bulan Dzulhijjah, Ulil Abshar Abdalla, dengan reorientasi paham keagamaannya, sekedar menyebut beberapa person-- mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat tidak lazim didengar oleh telinga orang-orang NU konservatif dan menganggap paham atau ajarannya itu sebagai kebenaran akhir yang “haram” untuk digugat.

pemikiran kritis dekonstruktif tersebut --bahkan mengakomodasinya-- sebagai bagian dari wacana yang perlu dihidupkan di dalam NU²⁸.

Pada gilirannya, realitas tersebut di atas --yang untuk mudahnya jika dibidik dari perspektif pendidikan, dapat diidentifikasi sebagai pendidikan agama berbasis moderatisme, bahkan liberalisme-- amat sangat mempengaruhi perilaku warga NU *level* menengah dan juga kalangan *grass root*. Kenyataan menunjukkan, bahwa anggota Barisan Serbaguna (Banser) Anshor yang membantu pengamanan gereja tatkala saudaranya yang beragama Nasrani melaksanakan Natal, merupakan fenomena toleransi yang tidak terbantahkan. Kegigihan Gus Dur dalam membela eksistensi agama Kong Hu Cu di Indonesia serta kedekatannya dengan tokoh-tokoh kalangan Kristen Katolik dan Protestan, seperti Kardinal Dharma Atmaja dan almarhum Romo Yusuf Bilyarta (YB) Mangun Wijaya dan beberapa tokoh lainnya.²⁹ Pada saat bersamaan, pandangan-pandangan keagamaan *aswaja* yang diintrodusir oleh Said Aqiel Siraj, *khalqah-khalqah* yang diadakan secara berkala oleh P3M, dan Jurnal Pemikiran Islam *Tashwirul Afkar*³⁰

²⁸ Bahkan bagi kalangan NU pengelola pesantren yang bersikap responsif terhadap gagasan pembaruan tersebut menganggap bahwa yang dilakukan NU selama ini hanyalah berkutat pada pegangan klasik berupa kitab kuning dengan mengabaikan aspek kontekstual berdasarkan perkembangan masyarakat. Padahal di luar kitab-kitab klasik NU itu, terjadi perkembangan yang luar biasa yang hanya bisa diakomodasi jika orang-orang NU membuka diri dan berdialog dengan realitas di dunia luarnya.

²⁹ Sebagaimana kita tahu, Kardinal Darma Atmaja, kepala umat Katolik di Indonesia, begitu akrab dengan Gus Dur, demikian pula dengan Bingki Irawan, seorang tokoh agama Kong Hu Cu. Bahkan sebagaimana kita tahu bersama, Gus Dur pernah berkelakar --dan ini menunjukkan kedekatan persahabatan beliau dengan tokoh yang bersangkutan yakni YB Mangun Wijaya-- dengan mengatakan bahwa **“Romo Mangun itu adalah seorang Muslim yang tidak shalat”**.

³⁰ Jurnal *Tashwirul Afkar* dalam setiap edisinya (sampai penelitian ini ditulis terbit 19 edisi) senantiasa menampilkan tema-tema *kritis-progresif-liberal dan dekonstruktif*. Misalnya edisi nomor 8 tentang Islam Liberal, edisi 9 menelusuri liberalisme Islam di NU, edisi 10 dengan tema Post Tradisionalisme Islam, edisi 11 bertema menuju pendidikan Islam Pluralis, edisi 12 dengan tema deformalisasi Syari'at, edisi 13 bertema menggugat fundamentalisme, edisi 14 mengangkat tema Islam pribumi, menolak Arabisme dan mencari model Islam Indonesia, edisi 16 tentang perebutan identitas Islam, edisi 17 berusaha memotret kritis bahwa NU ada dipersimpangan jalan, antara liberalisme dan fundamentalisme, edisi 18, menafsir kalam Tuhan secara

yang diterbitkan oleh Lakpesdam PB NU jelas sedemikian berpengaruh terhadap perilaku toleransi warga NU.³¹

Sekali lagi, fenomena tersebut merupakan realitas yang tidak terbantahkan betapa NU sedemikian berperan besar dalam mensosialisasikan pendidikan agama [Islam] berbasis moderatisme yang sedemikian *concern* pada pola berislam yang kritis, egaliter, liberal dan sekaligus toleran sekaligus mengikis habis *eksklusivisme*.

Penutup

Dengan tidak bermaksud melakukan pembelaan, merupakan sikap yang kurang bijak, tidak adil, *over estimate* dan sekaligus *arbitrer* jika dalam menilai kontribusi NU dalam wacana pendidikan agama berbasis moderatisme yang sedemikian ber-*concern* pada terwujudnya toleransi beragama, dianggap hanya sebatas –dan terbatas pada–permukaan serta masih dalam *level* dangkal sekaligus merupakan wacana tingkat elit, sehingga karena itu akan jauh dari berhasil.

Intensifikasi gagasan-gagasan tersebut secara massif, paling tidak, ke depan akan mempengaruhi perspektif generasi muda Islam –khususnya kalangan NU—yang semakin *melek akademis* dan mengalami *booming* intelektual—sehingga gagasan-gagasan itu pada gilirannya, tidak hanya berhenti sebatas wacana, namun beraktualisasi nyata seiring dengan dinamika kehidupan umat Islam –khususnya NU—yang terus berkembang. *Wa Allâh a'lam bi al-shawâb*. *

kritis dan tidak hegemonis, dan edisi 19 mengusung tema *manhâj al-fikr NU* yang belum tuntas dan terus dalam proses pencarian.

³¹ Dalam hubungan ini, paling tidak terdapat dua kelompok besar dalam merespons pemikiran-pemikiran baru dan dinamika internal NU, yakni kelompok atau sayap radikal dan sayap liberal moderat. Sayap pertama, teraktualisasi dalam pemikiran eksponen LKiS di Yogyakarta, kelompok 164 di Jakarta dan eLSAD di Surabaya. Sedangkan kelompok liberal moderat antara lain nampak dalam pemikiran Ulil Abshar Abdalla, Syafiq Hasyim dan Zuhairi Misrawi. Periksa Ida, *NU Muda*, hlm., 158.